

PROCEEDINGS

Entrepreneurship Seminar & Call for Paper

Improving Performance by Improving Environment

Rama Shinta Hall, Hotel Patra Jasa Semarang

Rabu, 14 - 15 Maret 2012

Vol. 2 No.1 Tahun 2012



Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Gedung C-6 Kampus UNNES Sekarang
Gunungpati, Semarang, 50229
Telp/Fax: 024-8508015 , <http://manajemen.unnes.ac.id>

mandiri

PROCEEDING

Eco-Entrepreneurship Seminar & Call for Paper

“Improving Performance by Improving Environment”

Editor Kepala:

Dr. Ketut Sudharma, M. M

Editor Pembantu:

Nury Ariani W, SE., M. Sc

Desti Ranihusna, SE., M. M

Dwi Cahyaningdyah, SE., M. Si

Siti Ridloah, SE

Vini Wiratno P, SE

KATA PENGANTAR

Lautan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya “**Proceeding untuk Call for Paper pada Seminar Nasional *Eco-Entrepreneurship***” dengan tema *Improving Performance by Improving Environment*, dapat terselasaikan dengan baik.

Call for Paper pada Seminar Nasional *Eco-Entrepreneurship* ini diselenggarakan oleh Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang (Unnes), sebagai rangkaian acara Dies Natalis Unnes yang ke-47. Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata Jurusan Manajemen FE Unnes untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang beretika dan berwawasan lingkungan.

Paper yang dikirimkan pada acara Call for Paper ini berjumlah 55 paper yang berasal dari para akademisi dan praktisi di bidang manajemen dan kewirausahaan dari berbagai institusi seperti Intitut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Papua, Universitas Katolik Parahyangan, Politeknik Negeri Media Kreatif serta 20 perguruan tinggi lainnya baik swasta maupun negeri yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Beberapa topik, baik hasil riset empiris, studi literatur atau konsep praktis, dirangkum dalam sebuah tema besar “*Improving Performance by Improving Environment*” Kami berharap, bahwasannya kegiatan ini dapat melahirkan wirausaha yang beretika dan berwawasan lingkungan. Maka konsep *eco-entrepreneurship* menjadi suatu hal yang urgen untuk diperkenalkan dan ditumbuhkembangkan menjadi spirit dasar praktik kewirausahaan masyarakat, sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas serta terlindunginya alam ini dari polusi dan eksploitasi yang membawa kerusakan dan penurunan kualitas kehidupan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Negeri Semarang dan seluruh jajarannya, seluruh peserta pemakalah, PT. Bank Mandiri Tbk, Bank Bukopin, PT Telkomsel, Penerbit Erlangga, Penerbit Salemba Empat, PT. Hampan Cipta, serta bapak/ ibu panitia yang turut membantu terselenggaranya acara ini. Kiranya dalam penulisan *proceeding* ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik dan saran yang membangun akan kami jadikan sebagai sarana menuju pencapaian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semarang, 13 Maret 2012

Moh. Khoiruddin, SE. M.Si

Ketua Panitia

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Panitia	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

Bidang Kajian Eco-Entrepreneur

Penerapan Program CSR di Propinsi Aceh Studi Kasus PT. Arun Ngl. Co. Lhokseumawe <i>Ghazali Syamni</i>	1
Pemberdayaan dan Pendampingan Pengolahan Limbah Botol Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis untuk Meningkatkan Taraf Perekonomian Keluarga pada Masyarakat Desa Girimoyo Malang Jawa Timur <i>Indah Yuliana</i>	8
Manajemen Ekologis: Mempertahankan dan Mengembangkan Saling Ketergantungan Secara Harmonis <i>Ismi Darmastuti & Much. Sahid</i>	13
<i>Green E-commerce</i> <i>Kenny Dewi Krisdiany</i>	21
<i>Accountant's Intention and Environmental Accounting</i> <i>Lisa Kartikasari</i>	25
Pengaruh Dimensi Atribut Produk Terhadap Sikap Konsumen pada <i>Green Product</i> Tolak Angin Cair <i>Nia Atmadianing Meigawati</i>	34

<i>Batik Industry Goesto Green Economy</i> <i>Prasetyo Ari Bowo</i>	44
Akuntansi Lingkungan sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era <i>Green Market</i> <i>Idris</i>	48
<i>Toward a Better Performance:Through CSR in HolisticMarketing Concept</i> (Menuju Kinerja yang Lebih Baik: Melalui CSR dalam Holistik Marketing Konsep) <i>Rini Kuswati</i>	56
Implementasi Kebijakan “ <i>Go Organik</i> ” (Studi Strategi Difusi Inovasi Budidaya Sayuran Organik pada Lahan Terbatas di Desa Patemon) <i>Etty Soesilowati, Dyah Rini Indriyanti , Widiyanto</i>	64
Pengaruh Biaya Politis, <i>Leverage</i> , dan <i>ROE</i> Terhadap Pengungkapan Pertanggung Jawaban Sosial pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia <i>Indah Fajarini SW &Agus Susanto</i>	76
<i>Corporate Social Responsibility</i> dapat Menunjang Tercapainya Tujuan Utama Perusahaan <i>Sylvia Fettry E. M</i>	89
Memasarkan Kota Melalui Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang <i>Shanty Oktavilia dan Firmansyah</i>	95
Sumber Daya Perusahaan, Kapabilitas SDM Berbasis Pengetahuan dan Lingkungan Bisnis Serta Dampaknya Terhadap Strategi Keunggulan Bersaing <i>Ketut Sudarma</i>	103
Green Banking: Prioritas Pada Sustainability Dalam Praktik Bisnisnya <i>Anindya Ardiansari</i>	109
<i>Green Social Entrepreneurship: Penggerak Lokomotif Perekonomian</i> <i>Rini Setyo Witiastuti</i>	114

Bidang Kajian Program Kewirausahaan di Dunia Pendidikan

Kendala Berwirausaha di Kalangan Mahasiswa <i>Amalia</i>	126
Pengembangan <i>Entrepreneur</i> Sejati Melalui Inkubator Bisnis <i>Bambang Suko Priyono</i>	134
Kemampuan Mahasiswa PGSD Semester IV dalam Melaksanakan Proses Berkarya, Apresiasi, Merencanakan, dan Pameran Seni Rupa Di PGSD Karanganyar FIP UNNES Semarang Tahun 2011 <i>Masitah</i>	140
<i>Creating Young Entrepreneurs: An Explorative Study at Karangturi International School</i> <i>Sandy Arief</i>	150
Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda Mahasiswa Politeknik Negeri Medan (Polmed) melalui Program Mahasiswa Wirausaha <i>Safaruddin</i>	157
Persepsi dan Perilaku Menabung Masyarakat di Kabupaten Jepara <i>Much. Imron</i>	163
Peningkatan Motivasi Mahasiswa dalam Pembelajaran Wirausaha Berbasis pada Pendekatan <i>Cultural Fit</i> <i>Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM</i>	172
Strategi Peningkatan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Bisnis dan Manajemen Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) <i>Widiyanto dan Sri Utaminingsih</i>	182
Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah kuala <i>Manda Andika & Iskandarsyah Madjid</i>	190

Bidang Kajian Prospek Wirausaha

Implementasi Konsep Waralaba sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penciptaan Wirausaha Baru <i>Andi Pangeran</i>	197
<i>Assessment</i> Lingkungan Eksternal dalam <i>Small Business Enterprises</i> Pendekatan Formulasi Strategi dalam Kewirausahaan <i>R. Heru kristanto HC</i>	204
Pengaruh <i>Adverse Selection</i> dan <i>Negative Framing</i> terhadap Eskalasi Komitmen <i>Maria Rio Rita & Milka Puspita Sari</i>	215
Komunitas Kreatif sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif Studi Kasus: Kota Bandung, Jawa Barat <i>Muliadi Palesangi, SE.,MBA</i>	224
Kewirausahaan di Bidang Industri Kreatif sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Indonesia <i>Misbah Fikrianto</i>	229
Merancang Lembaga Keuangan Mikro Menjadi Konglomerat <i>Wardoyo & Kartika Sari</i>	236
Pengaruh Sikap Kewirausahaan dan Kompetensi Petani terhadap Penerapan Teknologi Padi Organik serta Implikasinya pada Pemanfaatan Potensi Lokal <i>Kartib Bayu dan Eri Mustari</i>	244
Pemilihan <i>Marketing Communication Mix</i> bagi Industri Kreatif – Desain Fesyen Berbahan Baku Perca Kain <i>Angelina Vita</i>	254
Profil Usaha Pedagang Kaki Lima di Sekitar Simpang Lima Kota Semarang <i>Palupiningdyah & Widiyanto</i>	262
Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing UMKM <i>Hastin Umi anisah</i>	276

Pemberdayaan Masyarakat Suku Dayak Loksado Berbasis Kearifan Lokal <i>Irwansyah¹ dan Maya Sari Dewi</i>	284
Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Unit Produksi Di SMK Negeri 6 Semarang (Studi Kasus pada Jurusan Tata Boga Kelas XI) <i>Agung Kuswantoro</i>	293
Strategi Peningkatan Jaringan Pemasaran Usaha Kecil Batik Semarangan Melalui Internet di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang <i>Sucihatiningsih, Karsinah, Himawan AS</i>	304
Kajian Ekonomi Industri Pada Usaha Produksi Perkebunan Teh Rakyat di Indonesia <i>Nanang Yusroni, Ratna Kusumawati, Khanifah</i>	312
Usaha Optimalisasi Volume Ekspor Sektor Pertanian di Kabupaten Batang <i>Umar Chadiq, Nanang Yusroni, Wachjuni</i>	316

AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DI ERA *GREEN MARKET*

Idris

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : idris_unp@yahoo.co.id

Abstract

In the era when companies move toward *green company* in *green market* era, accountant become one of the important factors, because accountant is responsible to inform any operational information of the company in the form of financial report. Unfortunately, the statement of finance accounting standard does not need the company to inform the social information mainly the information about the responsibility of the company toward the environment. It is caused by unavailability of the clear regulation about the company's responsibility toward about it. Actually the regulation about the quality standard of environment has already been made, but it is not effectively implemented yet. This is because of that rule does not give economic incentive in its practice. This regulation will be more effective if it is combined with environmental tax system. The company may choose whether it processes the waste in accordance with the environmental quality to avoid paying the tax or it does not process the waste but has to pay the environmental tax. Any strategy chosen by the company causes the cost that known as external cost or environmental cost. The conventional financial accounting cannot present the information of environmental cost, because it functions to give information in making decision and responsibility. The financial report presented is focused on the importance of the stakeholders and stakeholders. So that it is needed to develop environmental accounting that is able to present the information about the company's operational which is related to the environment. The development of environmental accounting has to be in line with the construction of statement of financial accounting standard which is known as Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) that explains the accounting recognition on environmental cost. It means that environment cost is determined in product market price. When this recognition can be applied, it is hoped that the financial report presented will contain information about company operational system which is based on environmental protection. In the green market era, the companies that focus on profit taking, and do not care about the environment will get the penalty from the consumers, protest from the environmental activists, and the investor and probably from their employees.

Key Word: *Environmental Accounting, environmental Cost, environmental tax, environmental protection, environment responsibility, corporate social responsibility.*

1. Pendahuluan

Gencarnya kampanye lingkungan di tingkat internasional telah menyebabkan isu lingkungan merambah ke berbagai aspek kehidupan. Masalah lingkungan tidak hanya terfokus pada masalah lingkungan itu sendiri, melainkan telah diboncengi oleh kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju. Terlepas dari berbagai kepentingan tersebut, persoalan lingkungan harus dilihat sebagai masalah yang semakin kompleks dan rumit. Akibatnya masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah yang hanya diperhatikan oleh pakar lingkungan, melainkan juga oleh pakar ekonomi, khususnya pakar ekonomi lingkungan. Antara ekonomi dan lingkungan merupakan bidang kajian yang berbeda. Ekonom klasik memandang individu dan masyarakat sebagai penentu terbaik dalam aktivitas ekonomi, sementara aspek alam dipandang sebagai faktor penghambat untuk optimasi model-model ekonomi. Di lain pihak ekologi mempelajari

tentang sistem alam, fenomena dan proses alam dan tidak berhubungan dengan adaptasi dan tingkah laku umat manusia dalam kaitannya dengan ekonomi.

Antara ekonomi dan ekologi terdapat potensi terjadinya konflik dalam hubungan dengan penjelasan fungsional, kausal dan intensional yang digunakan. Ahli ekologi (*ecologists*) memandang bahwa analisis penggunaan sumberdaya alam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur aliran material dan transformasi energi, sedangkan ahli ekonomi (*economists*) menggunakan pendekatan teori ekonomi produksi. Ekonom neoklasik memandang kelangkaan sumberdaya alam dilihat dalam konteks relatif yang diatur oleh mekanisme pasar, sedangkan ekologi memandang bahwa kelangkaan sumberdaya dalam konteks mutlak. Sumberdaya alam memang gratis, tapi biaya menggantinya bila rusak akan menjadi tak terhingga. Ahli ekologi berpandangan destruksi sumberdaya genetik terhadap alam adalah kehilangan yang

tak dapat diganti, sehingga bisa mengancam kehidupan di masa yang akan datang. Sedangkan ekonom berpendapat bahwa keputusan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam berdasarkan perilaku ekonomi rasional.

Pada era pergerakan perusahaan kearah *green company*, kalangan industri tidak hanya dituntut untuk mengolah limbahnya semata, tetapi tuntutan masyarakat konsumen lebih jauh lagi yaitu agar proses produksi suatu barang mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan suatu produk setelah dikonsumsi (digunakan) tidak merusak lingkungan. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya ISO yang memuat kriteria lingkungan di dalam standar produksi suatu barang. Selain itu muncul pula ISO 14000 tentang sistem manajemen mutu lingkungan.

Berdasarkan pemikiran di atas ada beberapa masalah yang perlu didiskusikan secara komprehensif. Masalah tersebut antara lain bagaimana interaksi antara aktivitas ekonomi dan lingkungan, bagaimana perubahan perilaku konsumen ke arah green consumerism, bagaimana perlakuan biaya lingkungan pada sistem penyajian informasi keuangan, apakah pernyataan standar akuntansi keuangan yang telah ada bisa dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi keuangan yang memperlihatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

2. Pembahasan

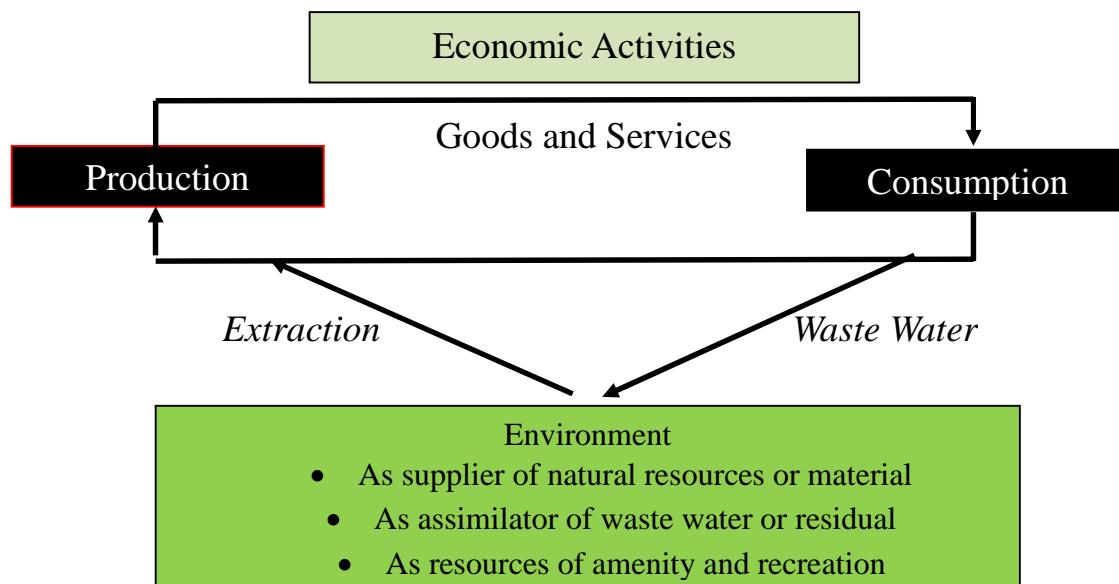
2.1. Interaksi Aktivitas Ekonomi dan Lingkungan

Masalah lingkungan muncul karena adanya interaksi antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Semakin tinggi tingkat intensitas interaksi kegiatan ekonomi dan lingkungan, maka akan semakin besar dampaknya terhadap degradasi lingkungan. Pada umumnya dalam literatur ekonomi hanya memperhatikan dan mengkaji tentang aktivitas produksi dan konsumsi dan keterkaitan diantara keduanya, sedangkan keterkaitan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan belum dimasukkan dalam analisis

ekonomi tersebut. Seharusnya dalam sistem ekonomi tidak hanya memperhatikan optimum produksi dan konsumsi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, tetapi harus pula memperhatikan bagaimana dampak dari aktivitas ekonomi tersebut terhadap pelestarian dan kualitas lingkungan alam. Bila kepentingan pelestarian dan kualitas lingkungan diperhitungkan dalam analisis sistem ekonomi, maka sistem ekonomi harus digambarkan seperti terlihat pada Gambar 1.

Pada Gambar 1 terlihat bahwa dalam ekonomi terdapat dua kegiatan pokok, yaitu produksi dan konsumsi barang dan jasa. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi tersebut berlangsung dalam lingkungan alami (*Natural environment*). Lingkungan menyediakan tiga fungsi utama, yaitu menyediakan sumberdaya, sebagai tempat kembalinya limbah, dan menyediakan sumber kesenangan (Field, 1997). Lingkungan menyediakan sumberdaya (*resources*) berupa bahan mentah (*raw material*) yang akan ditransformasi melalui kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari kegiatan produksi dan konsumsi tersebut dihasilkan limbah atau residual (baik padat, cair, atau gas) kemudian akan kembali ke lingkungan. Apabila pembuangan limbah ke lingkungan dilakukan tanpa penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi lingkungan atau akan terganggunya ekosistem alam secara keseluruhan. Selanjutnya lingkungan dapat menyediakan sumber kesenangan berupa jasa yang secara langsung dapat dikonsumsi berupa udara yang segar, zat-zat yang diperlukan tubuh dari makanan dan minuman, jasa lainnya yang tak terhitung banyaknya.

Gambar 1 : Interaksi antara kegiatan ekonomi dan lingkungan



2.2. Perubahan Perilaku Konsumen Ke arah Green Consumerism

Dalam KTT Bumi Rio, prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dikembangkan agar pengelolaan sumberdaya alam dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Hal tersebut tertuang dalam deklarasi Rio yang menyatakan kebulatan tekad para kepala pemerintahan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip tentang pengelolaan hutan, konvensi tentang perubahan iklim, dan konvensi tentang perubahan keanekaragaman hayati. Dengan memperhatikan keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi dan lingkungan, maka peranan usahawan sebagai pelaku ekonominya memegang peranan yang sangat penting. Usahawan diharapkan dapat mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Di beberapa negara maju muncul perubahan konsumen yang dikenal sebagai konsumerisme hijau (*green consumerism*). Menurut Susilo (1994), konsumerisme hijau adalah sebuah fenomena sosial baru di mana konsumen dalam membeli suatu produk tidak hanya mempertimbangkan masalah mutu, penampilan, harga, garansi, pelayanan purna jual saja, melainkan mempertimbangan masalah ekologi, etika, dan keadilan. Fenomena tersebut telah berkembang di negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, Amerika, Jepang dan beberapa negara lainnya. Pada gilirannya fenomena ini menciptakan permintaan terhadap barang yang ramah lingkungan atau produk hijau (*green product*). *Green product* ini hanya bisa diproduksi oleh perusahaan yang ramah lingkungan atau perusahaan hijau (*green company*). Produk yang telah diproduksi memenuhi standar lingkungan akan diberikan label ekologi, yang dikenal sebagai ekolabeling.

Peran konsumen yang perlu diwaspadai adalah menyangkut boikot konsumen dan boikot LSM lingkungan. Produk minyak kelapa sawit Indonesia pernah diboikot oleh *Green Peace*, karena dipandang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan bukan hanya dilihat dari segi produksi saja, melainkan dari hulu bahan bakunya. Kelapa sawit Indonesia diklaim ditanam pada lahan bekas hutan. Hutan ditebangi, kemudian sawit ditanam, padahal hutan adalah paru-paru dunia termasuk yang ada di Indonesia. Hal ini dianggap oleh *Green Peace* sebagai

suatu bentuk perusakan lingkungan. Itulah sebabnya mereka melakukan aksi boikot tersebut.

Pengaruh perdagangan internasional terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan pandangan yang berbeda-beda. Ada pihak yang memandang bahwa perluasan perdagangan internasional telah membawa peningkatan kesejahteraan dan perkembangan teknologi, yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melindungi dan memperbaiki lingkungan. Di lain pihak, perluasan perdagangan dapat merusak lingkungan apabila kebijakan perlindungan lingkungan dalam proses pembangunannya lemah.

2.3. Biaya Perlindungan lingkungan

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan pada pasal 6 (ayat 1) bahwa, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan; (ayat 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya pada pasal 16 ayat 1 : Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan. Dari ketentuan di atas terlihat bahwa setiap perusahaan yang menghasilkan limbah wajib untuk melakukan pengelolaan, sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terjaga. Selanjutnya dalam peraturan Menteri lingkungan hidup telah diatur tentang prosedur pengelolaan limbah dan polusi udara dengan menetapkan standar atau baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan ini akan dijadikan sebagai acuan bagi setiap perusahaan dalam pengelolaan limbah.

Aturan tentang baku mutu lingkungan tersebut harus bersifat memaksa, namun memberikan insentif kepada pelaku ekonomi dalam penerapannya. Bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi baku mutu lingkungan tersebut, dapat memilih cara lain yaitu membayar pajak lingkungan sesuai dengan tingkat pencemaran yang dilakukannya. Pemerintah memungut pajak lingkungan yang nantinya akan dipergunakan untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Apakah perusahaan akan memilih strategi mengolah limbah tapi tidak membayar pajak lingkungan atau tidak mengolah limbah tapi membayar pajak sangat bergantung pada sistem produksi yang dibangun oleh perusahaan. Apapun strategi yang dipilih oleh perusahaan, tetap berimplikasi pada biaya yang muncul terhadap perlindungan lingkungan tersebut.

Bila untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut perusahaan yang menghasilkan limbah memilih akan mengolah limbah untuk memenuhi baku mutu lingkungan, tentu akan dibutuhkan dana guna membangun Unit Pengolahan Limbah (UPL) dan

membiayai operasionalnya. Artinya untuk operasional UPL ini dibutuhkan biaya yang dikenal sebagai biaya eksternal atau biaya lingkungan. Bila dilihat dari hubungan biaya tersebut dengan produk yang dihasilkan, maka biaya tersebut tidak bisa diklasifikasikan baik sebagai biaya produksi langsung maupun biaya produksi tidak langsung. Sementara biaya lingkungan ini muncul, sebagai akibat kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Namun bila dilihat dari sisi perusahaan, biaya lingkungan merupakan biaya eksternal, sementara dilihat dari sisi masyarakat biaya lingkungan ini merupakan biaya internal.

2.4 Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkap Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) di dalam Suwardjono (2009), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Kegiatan akuntansi menghasilkan informasi tentang suatu perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan dan masukan penting dan relevan dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Isu lingkungan global mengalami perkembangan pesat yang berimplikasi pada perubahan kebutuhan para stakeholder seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Hal tersebut menuntut akuntansi harus mampu menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders. Dalam kaitannya dengan tuntutan tersebut, akuntansi juga telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga dikenal ada akuntansi keuangan konvensional dan akuntansi lingkungan.

Akuntansi keuangan konvensional belum dapat menyajikan informasi asset, liabilitas, pendapatan dan beban atau biaya yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan karena PSAK yang dijadikan sebagai pedoman belum mengatur secara jelas dan tegas kewajiban menyajikan informasi terkait dengan pelestarian lingkungan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi Tahun 2009) tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14 menyatakan bahwa "*Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.*

Bila dikaitkan dengan tanggung jawab entitas dalam upaya pelestarian lingkungan, maka PSAK tersebut belum mengakomodasinya secara totalitas. Ada dua hal penting yang perlu didiskusikan, yaitu:

1. Kalimat yang menyatakan "*Entitas dapat pula menyajikan*", mengandung arti bahwa PSAK baru berupa ajakan yang bersifat sukarela agar industri yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting. Sehingga yang terjadi di dalam praktek perusahaan hanya mengungkapkannya dengan sukarela saja. Sebelum memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi lingkungan, perusahaan terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkannya, maka perusahaan dengan sukarela akan mengungkapkan informasi tersebut (A. Darwin, 2004).

Riset yang dilakukan oleh Al-Tuwaijri dkk (2004 di dalam Andrianto, 2010) menguji hubungan antara tiga variable, yakni tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan (*environmental disclosure*), kualitas lingkungan (*environmental performance*), dan kinerja ekonomi perusahaan (*economic performance*) pada 531 perusahaan yang terdaftar di Wall Street pada tahun 1994. Hasilnya menunjukkan hasil bahwa terdapat korelasi yang positif diantara ketiga variabel tersebut. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tanggung jawab kepada lingkungan, maka akan semakin tinggi pula kualitas lingkungan dan demikian juga halnya dengan kinerja ekonomi perusahaan maupun sebaliknya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Patten (2002 di dalam Andrianto 2010), yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara pengungkapan tanggung jawab lingkungan oleh korporasi dengan kualitas lingkungan.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan karena aturan main (regulasi) mengenai lingkungan dimaksud antara satu negara dengan negara lain yang tidak seragam, sehingga mengakibatkan implementasi tanggung jawab korporasi kepada lingkungan akan berbeda pula. Selain itu tingkat kepedulian antara satu negara dibandingkan dengan negara lain terhadap lingkungan juga tidak sama. Misalnya undang-undang lingkungan di Inggris tidak terlalu detil dalam mengatur tanggung jawab terhadap lingkungan, namun korporasi di Inggris merupakan perusahaan yang lebih banyak mengimplementasikan tanggung jawab terhadap lingkungan dari pada korporasi di AS.

2. Kalimat yang menyatakan "*.....terpisah dari laporan keuangan*", kemudian dipertegas lagi oleh kalimat "*laporan tambahan tersebut di luar ruang*

lingkup Standar Akuntansi Keuangan”, mengandung arti bahwa PSAK belum memasukkan lingkungan sebagai bagian integral dalam operasional perusahaan, sehingga beban lingkungan yang timbul tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produksi dan atau tambahan biaya operasional tidak langsung. Padahal, pada hakekatnya biaya lingkungan adalah biaya yang muncul akibat kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya lingkungan ini tidak akan muncul. Keadilan ekonomi tidak ada bila terjadinya suatu penurunan fungsi lingkungan oleh suatu agen ekonomi (produsen), tetapi harus ditanggung oleh agen ekonomi lain (individu atau masyarakat) yang tidak ikut menikmati manfaat (benefit) dari suatu produk yang dihasilkan. Bila biaya lingkungan ini dibebankan pada produk yang dihasilkan, maka harga pokok produksinya akan menjadi naik dan pada gilirannya harga jualnya tentu akan naik pula.

Misalnya dari perhitungan harga pokok produksi suatu perusahaan tanpa memperhitungkan biaya lingkungan diperoleh harga pokok produksi satu unit produk sebesar Rp. 10.000,00. Bila diperhitungkan biaya lingkungan (biaya pengolahan limbah, biaya pemasangan filter agar jangan terjadi polusi, atau pembayaran pajak lingkungan) yang timbul akibat proses produksi tersebut sebesar Rp. 2.500,00 maka harga pokok produksinya menjadi Rp. 12.500,00. Seandainya biaya lingkungan tidak diperhitungkan, maka manajemen dapat membuat keputusan produk tersebut dijual pada harga Rp. 12.500,- per unit dan telah mempunyai margin sebesar 25% yang dapat digunakan untuk menutup biaya operasional, pajak perusahaan, dan keuntungan bagi pemilik. Tetapi bila biaya lingkungan tidak diperhitungkan, dan manajemen memutuskan harga jual produk tersebut Rp. 12.500,00 per unit maka perusahaan akan rugi, karena tidak ada margin untuk menutup biaya operasional dan keuntungan bagi pemilik. Agar perusahaan memperoleh keuntungan, tentu produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memperhitungkan kelestarian lingkungan (*green company*), harus dijual pada harga Rp 15.625,00 per unit untuk mendapatkan margin kotor sebesar 25%.

Bila perusahaan tidak memperhitungkan kelestarian lingkungan, dan menjual produk pada harga Rp. 12.500,00, maka dari sisi perusahaan harga tersebut sudah memberikan keuntungan sebesar 25%, begitu juga dari sisi konsumen harga tersebut telah menggambarkan kesediaan untuk membayar (*willingness to pay*) guna mendapatkan manfaat dari suatu unit produk. Tetapi bila dilihat dari sisi kepentingan masyarakat ternyata terdapat suatu ketidakadilan ekonomi atau eksternalitas, di mana masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, namun harus memikul biaya lingkungan sehingga kesejahteraannya akan menurun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalau perusahaan mendapatkan keuntungan dengan memenuhi kepuasan pelanggan, berarti perusahaan tersebut telah menerapkan konsep pemasaran (*marketing concept*). Namun kalau perusahaan mendapatkan keuntungan dengan memenuhi kepuasan pelanggan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, berarti perusahaan tersebut telah menerapkan konsep pemasaran berwawasan lingkungan (*societal marketing*).

Berdasarkan pemikiran di atas perlu disusun PSAK yang mampu menyajikan informasi tentang operasional perusahaan yang dikaitkan dengan penerapan konsep pemasaran yang berwawasan lingkungan (*societal marketing*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang akan dirumuskan tersebut setidaknya menjelaskan tentang bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan, sehingga biaya lingkungan tersebut tercermin dalam harga pasar produk dan atau merupakan bagian yang tidak terpisah dari Standar Akuntansi Keuangan. Bila hal ini dapat dilaksanakan, maka laporan keuangan yang disajikan akan berisi informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan.

Penyusunan PSAK ini sejalan dengan upaya mengimplementasikan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Agar kemampuan generasi yang akan datang tidak berkurang, maka lingkungan harus dilindungi. Selain itu penyusunan PSAK tersebut penting dilakukan karena terkait dengan tuntutan UU no 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur upaya dan kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

Pada 1980-an mulai dikenal Akuntansi lingkungan oleh banyak pihak sebagai respon atas meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan dalam segala aktivitas (Gray et. Al., 1996 di dalam Andrianto 2010). Respon tersebut didorong oleh desakan LSM lingkungan di Eropa Barat yang menyadari bagaimana peran korporasi di wilayah itu dalam mereduksi kualitas lingkungan. Di lain pihak penurunan kualitas tersebut mempengaruhi beberapa sendi kehidupan, termasuk kinerja ekonomi (baik korporasi maupun Negara). Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan telah mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya.

Menurut United States Environment Protection Agency (US EPA, 1996 di dalam Putra, 2008), mengemukakan bahwa fungsi utama dari akuntansi lingkungan adalah : *“an important function of environmental accounting is to bring environmental cost to the attention of corporate stakeholders who may be able and motivated to identify ways of reducing or avoiding thoses cost while at the sama time improving environmental quality.* Akuntansi lingkungan menyediakan informasi bagi kepentingan internal dan eksternal. Bagi pihak internal akuntansi lingkungan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan harga, pengendalian overhead, dan pembelanjaan, sedangkan bagi pihak eksternal akuntansi lingkungan memberikan dan mengungkapkan informasi lingkungan yang berhubungan dengan kepentingan publik dan komunitas keuangan.

Kehadiran akuntansi lingkungan adalah untuk menyempurnakan atau menutupi keterbatasan/kelemahan yang terjadi dalam praktek akuntansi konvensional saat ini. Dalam sistem akuntansi lingkungan, manajemen harus mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengukur dan mengungkapkan biaya lingkungan, serta mengevaluasi kinerja manajemen/pengelola lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Coopers et. Al. (1998) mengemukakan bahwa akuntansi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis untuk mencapai profitabilitas dan kesuksesan. Lebih lanjut Coopers et. Al (1998) menyatakan bahwa kesuksesan atau keberhasilan akuntansi lingkungan sangat tergantung pada beberapa kondisi, yaitu (1) implementasi dan integrasi akuntansi lingkungan ke dalam praktek-praktek kerja/bisnis secara rutin, dan (2) indentifikasi dan penggunaan data yang tepat dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akuntansi lingkungan mampu menyediakan informasi lingkungan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam bentuk kinerja lingkungan (*environmental performace*).

Pada dasarnya masalah pertanggungjawaban sosial

dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Sampai saat ini bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat disajikan pada *annual report* atau sebagai laporan yang terpisah dari *annual report*. Menurut Solihin (2008), pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia terutama berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities*, yang dapat dilihat dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Kedua*, pelaksanaan CSR sesuai dengan tuntutan undang-undang (bersifat mandatory). Misalnya, BUMN memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan sosial, dan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumberdaya alam atau berkaitan dengan sumberdaya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR seperti diatur oleh UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.

Dilihat dari sudut dasar hukum pelaksanaannya, CSR di Indonesia secara konseptual masih harus dipilah antara pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan besar dan CSR yang dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah. Selama ini terdapat anggapan yang keliru bahwa pelaksanaan CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, padahal perusahaan kecil dan menengah pun bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apalagi bila perusahaan kecil dan menengah itu banyak jumlahnya, tentu dampaknya akan terakumulasi dalam jumlah yang besar dan untuk mengatasinya akan lebih sulit dibandingkan dampak yang ditimbulkan oleh satu perusahaan besar.

Bila dilihat dari pelaksanaan CSR di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan program CSR dan membuat laporannya belum bisa dikatakan sebagai perusahaan yang telah menerapkan akuntansi lingkungan. Hal ini disebabkan karena dalam operasional perusahaan belum memasukkan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian integral.

Sampai saat ini pro dan kontra terhadap CSR masih bergulir (Solihin, 2008). Pendapat yang mendukung pelaksanaan CSR menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajer tidak hanya sekedar menghasilkan laba, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Ekspektasi masyarakat terhadap bisnis telah berubah. Perusahaan saat ini bukan lagi merupakan suatu entitas independen yang hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham saja, melainkan memiliki tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat yang telah ikut membentuk hukum dan undang-undang yang mengatur perilaku bisnis. Di samping itu

mereka juga harus menyadari bahwa masyarakatlah yang mendukung keberadaan perusahaan dengan perannya sebagai pembeli barang dan jasa. Untuk menanggapi ekspektasi masyarakat tersebut, maka perusahaan merumuskan program CSR yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diperkirakan perlu dilakukan oleh perusahaan. Sementara kelompok yang menentang CSR, memandang bahwa pelaksanaan kegiatan CSR dapat menghambat operasi sistem pasar bebas dan seringkali hanya bersifat sinis.

Penutup

Masalah lingkungan muncul karena adanya interaksi antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Semakin tinggi tingkat intensitas interaksi kegiatan ekonomi dan lingkungan, maka akan semakin besar dampaknya terhadap degradasi lingkungan. Pada umumnya dalam literatur ekonomi hanya memperhatikan dan mengkaji tentang aktivitas produksi dan konsumsi dan keterkaitan diantara keduanya, sedangkan keterkaitan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan belum dimasukkan dalam analisis ekonomi tersebut. Dengan memperhatikan keterkaitan yang erat antara aktivitas ekonomi dan lingkungan, maka peranan usahawan sebagai pelaku ekonominya memegang peranan yang sangat penting. Usahawan diharapkan dapat mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Selain itu perkembangan isu lingkungan global yang berimplikasi pada perubahan perilaku konsumen yang dikenal sebagai konsumerisme hijau (*green consumerism*). Konsumerisme hijau merupakan sebuah fenomena sosial baru di mana konsumen dalam membeli suatu produk tidak hanya mempertimbangkan masalah mutu, penampilan, harga, garansi, pelayanan purna jual saja, melainkan mempertimbangan masalah ekologi, etika, dan keadilan. Untuk itu perusahaan yang menghasilkan limbah wajib untuk melakukan pengelolaan limbah, baik dalam rangka memenuhi tuntutan peraturan perundangan maupun dalam rangka memenuhi perubahan perilaku konsumen. Perusahaan dapat memilih mengolah sendiri limbah atau polusi yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu lingkungan atau membayar pajak lingkungan. Apakah perusahaan akan memilih strategi mengolah limbah tapi tidak membayar pajak lingkungan atau tidak mengolah limbah tapi membayar pajak sangat bergantung pada sistem produksi yang dibangun oleh perusahaan. Apapun strategi yang dipilih oleh perusahaan, tetap berimplikasi pada biaya yang muncul terhadap perlindungan lingkungan tersebut

Untuk itu diperlukan sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelestarian lingkungan. Sampai saat ini akuntansi keuangan konvensional belum dapat menyajikan informasi asset, liabilitas, pendapatan dan beban atau biaya yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan karena PSAK yang dijadikan sebagai pedoman belum

mengatur secara jelas dan tegas kewajiban menyajikan informasi terkait dengan pelestarian lingkungan. Untuk itu perlu dirumuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dapat menjelaskan tentang bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan, sehingga biaya lingkungan tersebut tercermin dalam harga pasar produk dan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Akuntansi Keuangan. Bila hal ini dapat dilaksanakan, maka laporan keuangan yang disajikan akan berisi informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan.

Daftar Pustaka :

- A Darwin, Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia, “Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004.
- Coopers and Lybrand Consultants, 1998. *Environmental Accounting*, Volume 3 No. 2
- Idris, 1998. *Penerapan Konsep Green GDP Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasinya di Indonesia*, Buletin IKIP Padang
- , 2002. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Danau (Studi Kasus Di Danau Singkarak Provinsi Sumatera Barat)*, Disertasi Program Pascasarjana IPB Bogor.
- , 2003. *Penerapan Konsep Sustainable Development Sebagai Langkah Strategis Untuk Mempersiapkan Masa Depan Bangsa*, Artikel *ECONOMAC* Volume II No. 2 FE UNP Padang.
- , 2010. *Implementasi "Clean Development Mechanism" Di Sektor Energi*, Artikel, *Jurnal ECONOMAC*, Volume Nomor FE UNP Padang.
- , 2011, *Pemulihan Kearifan Lokal Untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Sumatera Barat*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hari Lingkungan Hidup 2011 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tanggal 23 Juli 2011.
- , 2012, *Internalization of the external cost to reach the rates of output that are socially efficient*, Presented on the International Conference at Bung Hatta University on February 11, 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009 (Revisi). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jati Andrianto, 2010. Pentingnya Akuntansi Di Era Green Market, di download 12/2/2012 22:32

<http://www.financeindonesia.org/content.php?330>

Putra, Wirmie Eka, 2008. *Penerapan Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Manajemn Lingkungan Sebagai Komponen Dasar Perencanaan Strategis Bisnis*, Percikan: Vol.94 Edisi November 2008.

Rossje, 2006. Akuntansi Lingkungan Suatu Perspektif, <http://rossje.com/?p=168>

Solihin, Ismail, 2008. *Corporate Social Responsibility, Fom chairty to sustainability*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Susilo, Zumrotin K, 1994. *Konsumen Hijau Pola Hidup Berwawasan Lingkungan*, Makalah disampaikan dalam Panael Diskusi “Kecenderungan Hidup Global Menyongsong Repelita VI, di Jakarta pada tanggal 5 April 1994.

Verani Carolina, Riki Martusa, dan Meythi, Akuntansi Lingkungan: Solusi Untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)

Yakin, Addinul. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Akademika Presindo, Jakarta.